

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Aries Mujiburohman, Dian. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Arizona, Yance. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2010.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1989.
- Busroh, Abu Daud, dan Abubakar Busro. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Cetakan pe. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Isrok, dan Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Jayawickrama, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Jo, Claeys, Maria Emília Brederode-santos, Rania Fazah, Annette Schneider, dan Zsuzsanna Szélényi. *Manual on Human Rights Education for Children*. 2 ed. Hungary: Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe, 2009.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Majda, El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. 5 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Nasution, Adnan Buyung, dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. 3 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Sakti, Nufransa Wira. *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- Sarja. *Negara Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suparyanto, Yudi. *Deklarasi HAM di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022.

Jurnal Ilmiah

Ardhanariswari, Riris. "State Responsibility During Covid-19 Pandemic in the Perspective of The Indonesian Constitutional Law." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 1 (2021).

Hasan, Muhardi, dan Estika Sari. "Hak Sipil dan Politik." *Demokrasi* IV, no. 1 (2005).

Herdiana, Dian. "Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. (2021).

Islam, Izzul, dan Wahjoe Poernomo Soeprpto. "Analisis Pemilihan Umum dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (*Staatenoodrecht*)." *Inico Legis* 2 (2021).

Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi." *Jurnal Konstitusi* 12 (2015).

Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 6.3 (2013).

Panjaitan, Saut P. "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara." *UNISIA* 10, no. XI.IV. (1991).

Saputra, Dadang Aji. "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Kepegawaian." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, n.d.

Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi

Badan Pusat Statistik. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019," 2019.

———. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020." Jakarta, 2020.

Department of State, United States. "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia." Washington, 2021.

Peslak, Alan, Li-Jen Shannon, dan Wendy Ceccucci. "An Empirical Study of Cell Phone and Smartphone Usage." *Issues in Information Systems* XII, no. 1 (2011).

Ulfah, Aprilia. "Status Sosial Ekonomi dan Kesehatan." 6. Kediri, 2016.

World Health Organization. "Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 22."

Media Online

Antara, Fauziah Mursid, dan Rr Laeny Sulistyawati. "Isu Halal-Haram Vaksin Masih Jadi Penyebab Banyaknya Warga Jakarta Belum Divaksinasi." *Republika.co.id*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r7v5ge409/isu-halalharam-vaksin-masih-jadi-penyebab-banyaknya-warga-jakarta-belum-divaksinasi>.

- ANTARA News. "DPR: Hak rakyat jangan hilang karena tak miliki 'smartphone,'" n.d. <https://www.antaraneews.com/berita/2389373/dpr-hak-rakyat-jangan-hilang-karena-tak-milikismartphone#mobile-nav>.
- . "Jakarta Fair jual tiket secara daring mulai harga Rp30 ribu," n.d. <https://www.antaraneews.com/berita/2922709/jakarta-fair-jual-tiket-secara-daring-mulai-harga-rp30-ribu>.
- . "Menparekraf ungkap masih ada kendala PeduliLindungi di daerah wisata," 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2582781/menparekraf-ungkap-masih-ada-kendala-pedulilindungi-di-daerah-wisata>.
- CNBC Indonesia. "Pandemi Covid-19 Terkuak! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Ganti Nama PSBB ke PPKM," 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721205108-4-262624/terkuak-ini-alasan-kenapa-pemerintah-ganti-nama-psbb-ke-ppkm>.
- Indonesia, VOA. "Mahfud MD Tanggapi Laporan Kemenlu AS Soal Peduli Lindungi," 17 April 2022. <https://voaindonesia.com/a/mahfud-md-tanggapi-laporan-kemenlu-as-soal-peduli-lindungi/6532894.html>.
- . "Polemik Seputar PeduliLindungi dalam Laporan HAM Deplu AS," 28 April 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/polemik-seputar-pedulilindungi-dalam-laporan-ham-deplu-as/6547915.html>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Kupas Tuntas Aplikasi PeduliLindungi," 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kupas-tuntas-aplikasi-pedulilindungi/>.
- Newzoo. "Top Countries by Smarthphone Penetration and Users," 2019. <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetrationand-users/>.
- . "Top Countries by Smartphone Users," 2020. <https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users>.
- Tempo.co. "Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini PPKM Level 4," 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1486390/gonta-ganti-istilah-penanganan-covid-19-psbb-hingga-terkini-ppkm-level-4>.
- The Editors of Encyclopaedia. "Declaration of Independence Key Facts," 2020. <https://www.britannica.com/summary/Declaration-of-Independence-Timeline>.
- World Health Organization. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020." Diakses 12 Februari 2022. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

Lainnya

France. *Declaration of Human and Civic Rights Of 26 August 1789.*

Republik Indonesia. *Himpunan Risalah Sidang dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang Berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nation, *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, Vol. I, 2008.*

